

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI RABU
1 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



DPRD KALTIM OPTIMIS 10 RAPERDA PRIORITAS BAKAL RAMPUNG TAHUN INI



**DISKUSI PABRIK SMELTER
SANGASANGA, BAHAS
PERMASALAHAN DARI HULU KE HILIR**



DPRD Kaltim Saat Pelaksanaan Rapat Paripurna

DPRD KALTIM OPTIMIS 10 RAPERDA PRIORITAS BAKAL RAMPUNG TAHUN INI

SAMARINDA - DPRD Kaltim berkomitmen untuk menyelesaikan 10 Raperda yang menjadi prioritas tahun ini. Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub, mengatakan bahwa target tersebut bisa tercapai sebelum tahun berakhir.

Menurut Rusman, awalnya ada 11 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2023, namun satu di antaranya ditunda pembahasannya karena data yang belum lengkap. Raperda tersebut akan dibahas kembali tahun depan.

"Jadi sekarang tinggal 10 Raperda yang harus diselesaikan tahun ini. Kami yakin bisa menyelesaikan semua," kata Rusman, Selasa (31/10/2023).

Rusman menjelaskan, saat ini ada 3 Raperda yang masih dalam proses pembahasan oleh Pansus. Ia berharap Pansus bisa bekerja cepat dan profesional untuk

menuntaskan tugasnya.

"Pansus sudah berjanji dengan kami untuk menyelesaikan pembahasan 3 Raperda tersebut. Kami optimis mereka bisa melakukannya," ujarnya.

Rusman menambahkan, keyakinannya didasarkan pada laporan yang diterimanya dari Pansus. Ia mengatakan, sebagian besar Pansus sudah mencapai tahap akhir atau finalisasi pembahasan. Tinggal menunggu evaluasi dari Kemendagri.

"Kami harap Kemendagri juga bisa mempercepat proses evaluasi. Pembahasan Raperda ini kami targetkan sampai pertengahan November. Jadi kami optimis bisa rampung sebelum pergantian tahun," pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



DPRD DORONG SERAPAN ANGGARAN OPD DIPERCEPAT, SEGERA SELESAIKAN PEMBAYARAN KEPADA KONTRAKTOR

SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim agar mempercepat penyerapan anggaran. Perihal ini pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji.

Seno Aji, mengaku akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembayaran kepada pihak kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.

"Kami akan rapat koordinasi dalam waktu dekat. Sebelum reses dua minggu lalu, kami sudah rapat koordinasi dengan pimpinan OPD. Kami minta mereka segera menyelesaikan pembayaran ke kontraktor," kata Seno Aji, Senin (31/10/2023).

Seno Aji menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk mengawasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Ia berharap tidak ada

lagi OPD yang menunda-nunda pembayaran ke kontraktor.

"Kami tidak mau ada OPD yang menunggak pembayaran ke kontraktor. Ini kan bisa berdampak pada kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Kami juga tidak mau ada anggaran yang menjadi Silpa karena tidak terserap," ujarnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diharap Seno juga melakukan percepatan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah rampung pekerjaannya, agar tak menumpuk di penghujung tahun. Hal ini agar anggaran tiap OPD terserap lebih cepat dan tidak lagi mendapat rapor merah.

"Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa meningkat," tandasnya. (eky/adv/dprd-kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Abdul Muin, Ketua Bawaslu Kota Samarinda (kanan)

MARAKNYA ALGAKA DI SAMARINDA, BAWASLU INGATKAN HANYA BOLEH SOSIALISASI

SAMARINDA - Menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024, kini makin marak bertebaran Alat Peraga Kampanye (Algaka) di beberapa fasilitas publik di Kota Samarinda. Padahal, saat ini belum memasuki tahapan kampanye.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda, Abdul Muin menjelaskan berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan KPU (PKPU) jika atribut yang terpasang terdapat unsur citra diri dan seruan ajakan, maka ada indikasi pelanggaran.

"Berdasarkan Perbawaslu & PKPU, jika merujuk pada citra diri, visi & misi, serta ajakan, itu tidak boleh," ujarnya

Muin menuturkan bahwa saat ini hanya boleh memasang Alat Peraga Sosialisasi, karena jika mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, menyebutkan masa kampanye baru akan dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

"Calon peserta pemilu dipersilakan mempromosikan dirinya, namun karena Indonesia adalah negara hukum, maka harus tetap

mematuhi aturan, karena kampanye baru boleh dilakukan tanggal 28 November 2023" tutur Muin

Terkait pengawasan di Kota Samarinda, Muin menjelaskan bahwa peserta pemilu yang ingin mensosialisasikan dirinya harus tetap berada dalam koridor regulasi.

"Beberapa waktu lalu, Bawaslu menginventarisir algaka yang mengandung unsur kampanye. Namun, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban melalui Satpol PP," ucap Muin

Lebih lanjut, Muin menjelaskan pemasangan algaka juga harus memperhatikan etika dan estetika. Menurutnya, algaka tidak boleh dipasang di fasilitas publik, serta harus memperhatikan keindahan kota agar tidak semrawut.

"Pemasangan harus sesuai dengan PKPU, Perbawaslu, dan Perda Samarinda. Tidak boleh pasang di tiang listrik, pohon, sekolah, bahkan rumah ibadah. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, kami meminta Satpol PP untuk menertibkan," pungkasnya.

Pewarta : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari



Diskusi Publik Pabrik Smelter Nikel Sanga-Sanga : Investasi Elite, Pekerja Sulit

DISKUSI PABRIK SMELTER SANGASANGA, BAHAS PERMASALAHAN DARI HULU KE HILIR

SAMARINDA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda menggelar diskusi publik di Bagios Cafe Samarinda, pada hari Senin (30/10). Tema yang diangkat yaitu Pabrik Smelter Nikel Sanga-sanga: Investasi Elite, Pekerja Sulit. Tema ini diambil dari hasil liputan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Samarinda.

Salah satu jurnalis yang terlibat dalam liputan ini, Muhibar Ary, mengisahkan perjalanan mereka memulai liputan sejak bulan Mei. Pada tahap liputan awal, mereka menemukan permasalahan tenaga kerja dan lingkungan.

"Dari situ kami mulai liputan selama tiga bulan dan dipublikasi pada Agustus," ungkap Ary.

Direktur Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen menjelaskan, perbincangan soal isu energi dan sumber daya alam, kerap di tone negatif. Transisi energi mungkin sebagian terasa terlalu jauh untuk wilayah yang akses energinya masih terbatas. Bahkan kota-kota besar di Kaltim baru-baru saja menikmati listrik tidak biarpet.

"Smelter nikel ini bagian dari upaya hilirisasi energi. Industri ini padat modal. Nilai investasi kerap membuat ilusi kesejahteraan. Ternyata teknologi smelter ini hulunya juga bermasalah," ujar Fathur Roziqin

Dia menambahkan, bagi Walhi bukan industri padat modalnya. Sebab, energi kita sudah surplus. Smelter ini, strategi menyerap energi yang berlimpah. Insentif pemerintah untuk transisi energi juga jor-joran.

"Aspek yang perlu dilihat soal dampak ke pekerja dan lingkungannya. Warga sekitar sudah banyak berteriak. Hadirnya industri ini, harus disampaikan bagaimana dampaknya untuk kita," terangnya

Transisi energi yang ditawarkan adalah solusi palsu. Di satu sisi dia mempopulerkan isu iklim, tapi di sisi lain sebenarnya juga ada perampasan ruang hidup dan lingkungan.

"Segala macam risiko industri menjadi kabur dan sumir," sambungnya.

Sementara itu, Dinamisator Jatim Kaltim, Mareta Sari menambahkan, Sanga-Sanga yang menjadi lokasi smelter sudah menanggung banyak industri.

"Ada pertambangan batu bara, migas, hingga perkebunan sawit," jelasnya.

Adanya nikel ini, tidak hanya hilirisasi. Tetapi juga agenda ekonomi. Namun sayangnya, ternyata juga kesejahteraan di industri ini bermasalah. Harga nikel tidak stabil dan tidak benar-benar membuat kaya.

"Logika yang dibangun adalah apabila biji nikel diolah jadi stainless steel naiknya 19 kali lipat. Kalau meningkat, mengejar ekonomi juga. Tetapi masih kerap bermasalah soal gaji," tegas Mareta.

Mengenai perspektif soal tenaga kerja, disampaikan oleh Marwansyah dari Serikat Buruh Samarinda (Serinda). Dia mengatakan bahwa tenaga kerja asing maupun lokal memiliki permasalahan masing-masing.

Menurutnya, TKA yang masuk

menghadapi permasalahan seperti rasisme. Ini bukan masalah Indonesia atau tidak. Tetapi masalahnya adalah ada kontrol dari investor yang membuat penyerapan TKA lebih banyak.

"Padahal negara sudah sadar, datangnya pekerja asing, berarti negara gagal menyiapkan SDM untuk industri ini," paparnya.

Marwansyah menambahkan, soal kecelakaan kerja mestinya ada pengusutan, TKA juga punya persoalan sama dengan pekerja Indonesia. Banyak TKA yang juga kena tipu dengan jam kerja tidak normal dan tidak sesuai dengan kontrak.

Sementara itu, Kasi Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Disnaker Kaltim, Dedy Nugroho mengatakan, dari data yang dia miliki, ada sekitar 276 TKA Tiongkok. Memang, pekerja sebenarnya wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Tetapi ketentuannya setelah pekerja tiga bulan.

"Memang dari monitoring kami, masih banyak yang belum memiliki RPTKA. Alasannya, masih ada yang belum tiga bulan dan pakai visa tenaga kerja," ujar Dedy Nugroho

Diakuinya, serikat pekerja banyak membantu pihaknya untuk melakukan monitoring, karena banyak kejadian yang tidak sesuai harapan. Namun, dia menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawal urusan ketenagakerjaan.

Pewarta : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari



PERFECT HEALTH HADIR KEMBALI DI BIG MALL SAMARINDA, TAWARKAN BERAGAM PRODUK TERBARU

SAMARINDA - Perfect Health, sebagai pelopor dalam produk teknologi kesehatan canggih, dengan bangga mengumumkan pembukaan kembali Perfect Health Store di Big Mall Samarinda. Sebuah pencapaian berarti bagi Perfect Health untuk terus berkomitmen dalam menyediakan solusi kesehatan dan kenyamanan terkini kepada masyarakat.

Acara Re-opening dibuka oleh Adi Prasetyo selaku Pimpinan Perfect Health. Dijelaskan bahwa konsep store high technology mencerminkan tujuan Perfect Health untuk terus berupaya menghasilkan produk kesehatan andalan dengan kombinasi unik antara teknologi tinggi dan pengalaman yang berfokus pada kesejahteraan kesehatan bagi seluruh pelanggan setia Perfect Health.

"Perfect Health memiliki visi yang kuat untuk menjadikan teknologi kesehatan canggih sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Re-opening store di Big Mall Samarinda adalah salah satu langkah dalam perjalanan Perfect Health, yang menggarisbawahi komitmen kami untuk memberikan inovasi, kenyamanan, dan kesejahteraan kepada setiap pelanggan," jelas Adi pada Selasa (31/10/2023).

Perfect Health telah berdiri sejak tahun 1996 sebagai lambang produk kesehatan inovatif, terutama kursi pijat canggih dan berbagai perangkat kesehatan terbaru. Reopening Perfect Health Store di Big Mall Samarinda menunjukkan dedikasi Perfect Health untuk mendistribusikan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memulai gaya hidup sehat dan mencapai kesehatan yang optimal.

Adi menyebutkan, kali ini Perfect Health menghadirkan beberapa produk terbaru. Antara lain, Perfect Glam II, merupakan produk flagship dari Perfect Health yang menggabungkan kemewahan dan teknologi terkini dengan sempurna. Hadir dengan fitur yang tercanggih di kelasnya yaitu i-open flexible rail yang dimana tubuh dapat berbaring 166 derajat

yang di kombinasikan dengan teknologi pijatan 4D Pro. Perfect Glam II ini juga dilengkapi alat pendeteksi Kesehatan yang dapat mendeteksi detak jantung dan kadar oksigen dalam tubuh. Syal pemanas, dan wireless charging juga disematkan melengkapi kesempurnaan dari kursi pijat Perfect Glam II.

Selain itu, Perfection III, mengikuti sukses pendahulunya Perfection III ini sudah dilengkapi dengan fitur i-open real flexible rail yang dikombinasikan dengan teknologi pijat 4D pro. Perfection III sudah dilengkapi dengan syal pemanas, 11 teknik pemijatan dan 18 jenis program pijat.

Kemudian, adapula Elgrand dan Perfect Live Smart Scale, timbangan pintar yang dapat memantau berat badan dan Kesehatan yang bisa disambungkan ke smartphone melalui aplikasi.

Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan terbaik dari para pelanggan, Adi meninformasikan bahwa Perfect Health menghadirkan promo khusus Re-opening yang berlaku hingga 31 Oktober 2023. Pelanggan berkesempatan mendapatkan cashback hingga 17 juta rupiah untuk produk tertentu.

Diketahui, Perfect Health adalah merek terkenal di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 26 tahun, mendistribusikan produk-produk inovatif yang menunjang gaya hidup sehat dengan spesialisasi pada kursi pijat yang sangat di perlukan dan bermanfaat untuk perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Perfect Health terus berkembang dengan peningkatan jumlah customer di Indonesia yang signifikan dari tahun ke tahun. Slogan kami adalah "Perfect Life, Healthy Living".

Produk PERFECT HEALTH telah diakui dan diuji oleh CE (Conformité Européenne), GS (Global System) dan TUV SUD. Toko-Toko kami terletak di semua kota besar di Indonesia dan di rancang dengan desain yang modern dan kontemporer. Manajemen kami didukung oleh orang-orang dengan pengalaman yang terbaik dalam produk peralatan kesehatan. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



SEORANG PENGEDAR DIRINGKUS POLRESTA SAMARINDA, KANTONGI 4 POKET SABU DAN UANG RP 450 RIBU HASIL JUALAN SABU

SAMARINDA - Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di Jalan P. Suryanata Kelurahan Bukit pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Kasat Resnarkoba Polresta Samarinda menjelaskan kronologis kejadian yaitu, pada hari Jum'at (27/10/2023), diterima laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Bukit pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

Kemudian, anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda melakukan observasi dengan cermat, dan sekitar pukul 19.30 Wita dilakukan pengeledahan terhadap 1 orang laki-laki yang berinisial M (36) yang pada saat itu sedang berhenti. Si M (36) menggunakan 1 unit kendaraan R2 merk Suzuki Shogun warna hitam seorang diri. Di dalam kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemu-

kan barang bukti berupa 1 buah klip plastik yang berisikan 2 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,41 gram bruto yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan pelaku.

Kemudian ditemukan kembali 1 buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,46 gram bruto, 1 buah sendok penakar yang terbungkus 1 buah klip plastic ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Pelaku, Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 450 ribu ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanannya.

Selanjutnya pelaku M (36) beserta barang buktinya diamankan di Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~ 30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Breakfast 2 pax | | FREE Laundry Up To 2 pcs | | FREE Kopi Inspirasi Buy 3, Pay 2 | |
| FREE Afternoon Tea | | FREE Mini Mantou 5 pcs | | | |

➔ BOOK NOW

0811 581 3669
www.hotelgrandkartika.com



PEMKAB PPU LAUNCHING PORTAL SATU DATA UNTUK WUJUDKAN SDI



WADAH KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI, PEMKAB PPU
GELAR FORUM SATU DATA



Peluncuran Portal Satu Data PPU, Selasa (31/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU LAUNCHING PORTAL SATU DATA UNTUK WUJUDKAN SDI

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus mengupayakan perwujudan Satu Data Indonesia (SDI). Salah satu langkahnya ialah dengan melaunching Portal Satu Data Kabupaten PPU, Selasa (31/10/2023).

Pemkab PPU juga telah menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten PPU di aula lantai III Kantor Bupati PPU. Forum ini bertujuan juga sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi semua pihak terkait, dalam penyelenggaraan tata kelola data pembangunan untuk mewujudkan SDI.

Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Ade Rianto Embongbulan menyampaikan bahwa Forum Satu Data PPU sejak berlakunya kebijakan SDI 2019 telah melakukan beberapa hal. Mulai dari aspek regulasi, pelaksanaan perencanaan dan pengisian data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyebaran data.

Dari aspek regulasi, Pemkab PPU telah menerbitkan Perbup 37/2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 050.13/217/2022 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan perencanaan dan pengisian daftar data, pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 1.302 data statistik dan 10 Informasi Geospasial Tematik dalam daftar data

prioritas daerah, yang didasarkan pada kebutuhan data pembangunan seperti RPJMD, SDGs, Evaluasi Pembangunan, dan lainnya.

"Hal ini meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 741 daftar data dan tahun 2021 sebesar 671 daftar data. Begitu pula dengan tingkat ketercapaian keterisiannya, kenaikan presentase tingkat keterisian mencapai angka 77,6 persen," ungkapnya.

Untuk peningkatan kualitas SDM, pada tahun 2023 ini, dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi metadata kepada administrator data di perangkat daerah serta dilakukan pula pembinaan data statistik di 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku.

"Dalam penyebaran data, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PPU telah membangun Portal Data Daerah melalui aplikasi Portal Satu Data Indonesia. Diharapkan portal ini dapat digunakan dalam pengisian data pada tahun 2024," ucap Ade.

Dalam forum ini, disosialisasikan pula rencana adanya aplikasi kamus SDI-PPU yang dirancang oleh BPS PPU guna memudahkan perangkat daerah dalam memahami istilah-istilah terkait SDI. Selain itu, melalui forum ini, diluncurkan pula Portal Satu Data Kabupaten PPU yang disaksikan oleh peserta Forum Satu Data. Portal Satu Data Kabupaten PPU dapat diakses melalui data.penajamkab.go.id. (ADV/SBK)



Peluncuran portal satu data dalam Forum Satu Data PPU yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (31/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

WADAH KOMUNIKASI DAN KOORDINASI, PEMKAB PPU GELAR FORUM SATU DATA

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten PPU di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (31/10/2023). Forum ini bertujuan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi semua pihak terkait, dalam penyelenggaraan tata kelola data pembangunan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Khairil Anwar, Kepala BPS PPU Hotbel Purba, dan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Herlambang mewakili Pj Bupati PPU.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat secara nasional telah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan data secara nasional.

Bertujuan pula untuk mendukung percepatan penyediaan data yang terpadu, mu-

takhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Herlambang menyebut kebijakan ini wajib diimplementasikan di PPU sebagai mitra Ibukota Nusantara (IKN).

“Saat ini semua mata dan perhatian publik nasional bahkan internasional tertuju ke kabupaten kita ini. Keberadaan data dan informasi terkait daerah kita ini menjadi krusial dan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak,” ucapnya.

Dalam forum ini, disosialisasikan pula rencana adanya aplikasi kamus SDI-PPU yang dirancang oleh BPS PPU. Guna memudahkan perangkat daerah dalam memahami istilah-istilah terkait SDI.

Selain itu, melalui forum ini, diluncurkan pula Portal Satu Data Kabupaten PPU yang disaksikan oleh peserta Forum Satu Data. Portal Satu Data Kabupaten PPU dapat diakses melalui data.penajamkab.go.id.

“Agar semua aspek terkait pelaksanaan pembangunan harus berbasis bukti, berdasar data yang akurat dan faktual,” tutup Herlambang. **(ADV/SBK)**

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR KUKAR

EDISI RABU
1 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



JEMBATAN KARTANEGARA AKAN DILENGKAPI DENGAN FASILITAS SHMS



**Kukar Terima Penghargaan
di Malam Anugerah Mulawarman
University Award 2023**



Jembatan Kartanegara, Tenggarong. (Istimewa)

JEMBATAN KARTANEGARA AKAN DILENGKAPI DENGAN FASILITAS SHMS

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, berencana melengkapi Jembatan Kartanegara dengan Structural Health Monitoring System (SHMS).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa dengan terpasangnya alat Structure Health Monitoring System (SHMS) akan memberikan kemudahan dalam melakukan kontrol kelayakan jembatan.

Dengan pemasangan SHMS ini, Dinas PU Kukar tidak perlu lagi melakukan pengujian statis dan dinamis pada jembatan. Karena dengan pemasangan SHMS di Jembatan Kartanegara, keterangan mengenai kondisi jembatan dapat tercatat secara elektronik.

"Selain itu, jika SHMS terpasang, maka kondisi jembatan akan tercatat secara periodik," kata Linda.

Selain itu, fungsi SHMS di infrastruktur jembatan mampu mendeteksi secara dini kemungkinan adanya gangguan atau kelainan pada struktur jembatan. Alat tersebut mampu mendata perilaku struktur dan menganalisis apakah perlu atau tidaknya memperbaiki infrastruktur jembatan dalam periode waktu tertentu.

Secara teknis, SHMS mampu mengukur

getaran yang terjadi pada jembatan. Selanjutnya, memonitor distribusi tegangan infrastruktur jembatan saat menerima beban dan memantau pengaruh lingkungan sekitar terhadap infrastruktur.

Cara kerja SHMS dilakukan dengan menempatkan sensor di titik yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dari sensor akan diproses oleh instrumen TMR Interface Module.

"Data SHMS akan ditampilkan secara langsung di layar komputer milik dinas," tuturnya. Dinas PU Kukar sendiri, telah menyiapkan anggaran senilai Rp 8,5 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023, untuk memasang alat tersebut pada tahun ini.

Selain pemasangan sensor pada 2023 ini, pemerintah kabupaten juga melakukan perawatan berkala kepada Jembatan Kartanegara. Rehabilitasi jembatan yang dikerjakan meliputi perbaikan badan jalan dengan melapis ulang aspal jalan. Termasuk memperbaiki drainase jembatan, agar meminimalisir genangan air di badan jalan di atas jembatan.

"Perbaikan tersebut ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Ilustrasi perahu nelayan. (Istimewa)

Kuat dan Ramah Lingkungan, Pemkab Kukar Dorong Nelayan Untuk Beralih ke Perahu Fiber

TENGGARONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, mendorong nelayan untuk mulai beralih dari perahu berbahan kayu ke penggunaan perahu berbahan fiber.

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Asli Husaini, mengatakan dorongan agar masyarakat mulai menggunakan perahu berbahan fiber ini sudah dilakukan Pemkab sejak dua tahun terakhir.

Terbukti, dalam setiap penyakuran bantuan program 25 ribu nelayan produktif, Pemkab Kukar selalu menyalurkan bantuan berupa perahu yang bermaterial fiber. Asli menuturkan, bahan fiber glass dipilih karena memiliki keunggulan dalam segi kekuatan dan ketahanan.

Berbeda dengan perahu berbahan kayu yang cenderung lapuk dan kurang tahan lama. Perahu berbahan fiber dinilai lebih kuat dan juga dapat bertahan lebih lama. Selain aspek keawetan dan kekuatan material, sulitnya mendapatkan bahan baku kayu untuk pembuatan perahu merupakan faktor lain yang mendukung peralihan ke perahu fiber.

Untuk menunjang tingginya kebutuhan

perahu bagi para nelayan di Kukar, DKP Kukar juga telah meluncurkan program pelatihan pembuatan perahu fiber. Sebagai bagian dari usaha pemberdayaan nelayan. Langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penggunaan bahan yang ramah lingkungan serta mendukung keberlanjutan usaha nelayan.

"Kami terus memberikan pelatihan bagi mereka yang berminat untuk membuat perahu fiber," ungkap Asli Husaini, Selasa (31/10/2023).

Dukungan dari komunitas nelayan juga turut mempercepat peralihan dari perahu kayu ke perahu fiber. Dalam rangka program pelatihan pembuatan perahu fiber, DKP Kukar akan bekerja sama dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung, Sulawesi Utara, yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Saat ini, DKP Kukar telah mulai menerima pasokan perahu fiber dari pengrajin di Kecamatan Kota Bangun dan Muara Muntai. "BPPP Bitung akan mengeluarkan sertifikat yang menjamin kualitas pembuatan perahu fiber dari mereka," tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Edotor : Muhammad Rafi'i



Sekcab Kukar, Sunggono, saat menerima penghargaan dari Unmul Samarinda. (Istimewa)

Kukar Terima Penghargaan di Malam Anugerah Mulawarman University Award 2023

TENGGARONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) patut berbangga diri. Pasaunya beberapa waktu lalu Pemkab Kukar berhasil menyabet penghargaan dalam malam penganugerahan Mulawarman University Award 2023 atau Multy Award 2023.

Pemkab Kukar menerima penghargaan dengan kategori Cum Loude Award untuk Indikator Pertumbuhan Ekonomi. Berkat realisasi program Terang Kampongku, yang merupakan salah satu program dedikasi Kukar Idaman.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Kukar, Sunggono, pada malam penganugerahan Mulawarman University Award 2023 atau Multy Award 2023 di Hotel Puri Senyuir Samarinda, beberapa waktu lalu.

Sunggono menerima penghargaan tersebut dengan didampingi oleh tiga pejabat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDa) Kukar. Diantaranya Murdiansyah, Masril, dan Fatul Alamin.

Dalam kesempatan itu, Sung-

gono mengatakan, Kukar selain menjadi pemenang pada indikator pemerataan ekonomi, juga masuk ke dalam nominasi indikator Pelayanan Pendidikan dengan program unggulan SDM Idaman.

Selain itu, Kukar juga masuk ke dalam nominasi dengan indikator Kesenambungan dan Keseimbangan Politik dengan program unggulan Forkopimda Mendingar, dan indikator Pertanggung Jawaban Publik.

"Bupati kita selalu mengingatkan kepada semua di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa semua kegiatan pembangunan di Kukar harus memberikan manfaat dan menyentuh kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Diketahui, malam penganugerahan Mulawarman University Award 2023 ini merupakan bentuk kontribusi dan kepedulian perguruan tinggi negeri Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Terutama untuk memberikan penilaian dan apresiasi kepada kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Terkait inovasi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Adapun, indikator-indikator pada malam penganugerahan Mulawarman University Award 2023, di antaranya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi Lokal.

Kemudian Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Administrasi, Partisipasi Publik, Kesenambungan dan Keseimbangan Politik, serta Pertanggung Jawaban Publik.

Sunggono turut menerangkan, seluruh program yang digencarkan oleh Pemkab Kukar merupakan program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat.

Hal itu sesuai dengan arahan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi Pemkab Kukar ke depan, akan mengingatkan OPD bahwa semua kegiatan yang ada harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat," tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'



Suasana pelatihan pengolahan olahan dari batang pisang. (Istimewa)

Inovatif, Limbah Pisang Disulap Warga Kembang Janggut Jadi Dodol dan Keripik

TENGGARONG - Warga Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar), berhasil mengolah limbah pohon pisang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis di pasar. Masyarakat setempat berhasil mengolah limbah batang pisang tersebut menjadi dodol kulit pisang dan keripik kulit pisang.

Ini dilakukan dalam pelatihan bersama Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Sarpras, SDA dan TTG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Atih Hayati.

Pelatihan ini diikuti dengan sangat antusias oleh ibu-ibu. Baik dari kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Atih, bukan hanya diolah menjadi dodol kulit pisang saja, kedepan pi-

haknya akan berinovasi kembali untuk mengembangkan aneka ragam olahan. Agar bisa menjadi salah satu produk unggulan desa dan kecamatan.

"Awalnya kami memberikan pelatihan-pelatihan dan sekarang kami tengah membantu untuk proses perizinan, semoga semua dimudahkan sehingga ini bisa menjadi sumber tambahan bagi desa dan khususnya bagi keluarga," terang Atih.

Dengan begitu, ia berharap akan banyak inovasi-inovasi pengembangan limbah makanan menjadi makanan berkualitas yang bergizi. Dan memiliki nilai jual tinggi di Kutai Kartanegara.

"Kutai Kartanegara memiliki banyak potensi untuk dikembangkan tinggal bagaimana kejelian kita memanfaatkan potensi tersebut," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



IKUTI JOB FAIR BONTANG 2023, PUPUK KALTIM BUKA KESEMPATAN MAGANG

BACA HALAMAN A2



**PROGRAM INOVASI WOLBACHIA
BERJALAN, MASYARAKAT DIMINTA
TETAP TERAPKAN PHBS CEGAH DBD**



Ikuti Job Fair Bontang 2023, Pupuk Kaltim Buka Kesempatan Magang

BONTANG - Dorong terbukanya pasar kerja secara terbuka dan transparan, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) fasilitasi sekaligus mendukung penuh terselenggaranya Job Fair Bontang 2023, sebagai jembatan bagi para pencari kerja sesuai kebutuhan perusahaan, instansi maupun lembaga yang ada di Kota Bontang.

SVP SDM Pupuk Kaltim Ardi Harto Mulyo, mengatakan Job Fair tahun ini merupakan sarana efektif untuk menjangkau potensi sumberdaya andal di tingkat lokal Bontang, untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di berbagai bidang. Termasuk peluang pengembangan kapasitas dan kompetensi masyarakat, agar makin mampu bersaing dengan daerah luar.

Hal ini menjadi salah satu fokus Pupuk Kaltim dengan turut membuka kesempatan pemagangan bagi warga Bontang melalui Job Fair 2023, untuk disiapkan

sebagai SDM andal dan berkompeten sesuai kebutuhan dunia industri.

"Nantinya, para peserta akan dilatih dan ditempatkan di berbagai unit kerja perusahaan, guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas bidang ilmu yang dimiliki," ujar Ardi, saat pembukaan Job Fair Bontang di Gedung Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim, Selasa (24/10/2023).

Dijelaskan Ardi, Pupuk Kaltim terus berupaya meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam mendorong peningkatan daya saing SDM lokal, agar mampu berkompetisi dan bersaing secara nyata di pasar kerja. Menurut dia, SDM lokal memiliki kualifikasi dan kemampuan yang tidak kalah dengan daerah luar, sehingga patut didukung agar putra daerah mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang.

Hal ini pun ditindaklanjuti Pupuk Kaltim dengan memberikan kesem-

tan warga Bontang magang terbuka di unit kerja perusahaan, agar keterampilan yang dimiliki makin terasah serta siap untuk bersaing sesuai kebutuhan dunia industri.

"Pupuk Kaltim berharap Job Fair Bontang 2023 dapat menjadi jembatan bagi putra-putri lokal Bontang mendapatkan kesempatan bersaing di pasar kerja, sehingga masyarakat mandiri dan sejahtera secara perlahan mampu diwujudkan," tambah Ardi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Abdu Safa Muha, menyampaikan Job Fair 2023 diikuti oleh 30 perusahaan di Kota Bontang, untuk membuka kesempatan langsung bagi warga lokal mencari peluang kerja secara fair dan transparan.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan membuka program pengembangan kapasitas masyarakat melalui pe-

Lanjutan Utama

magangan, sertifikasi dan pelatihan seperti halnya Pupuk Kaltim, guna mendorong terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang andal di berbagai bidang.

"Gagasan utamanya, Job Fair ini tidak hanya sekadar menjembatani peluang kerja, tapi juga program pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM oleh perusahaan, untuk disiapkan sebagai tenaga terampil sesuai kebutuhan pasar kerja," tutur Abdu Safa Muha.

Menurut Safa Muha, hal ini ditujukan agar seluruh perusahaan maupun lembaga di Kota Bontang memiliki semangat yang sama dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat, sehingga kedepan SDM lokal makin mampu bersaing untuk mendapatkan peluang yang sama di pasar kerja.

Langkah ini juga upaya menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Bontang, dimana masyarakat dengan kapasitas dan kemampuan yang teruji akan memiliki kesempatan lebih luas untuk terserap di dunia industri.

"Itu tujuannya, agar saat ada rekrutmen terbuka SDM Bontang mampu bersaing secara sehat untuk mendapatkan kesempatan, didukung kompetensi dan kapasitas mumpuni dari hasil pemagangan maupun sertifikasi yang diikuti," lanjut Safa Muha.

Wakil Wali Kota Bontang Najirah, mengaku sangat mendukung terselenggaranya Job Fair 2023 untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan secara terbuka. Dirinya pun mengapresiasi dukungan Pupuk Kaltim yang turut mensukseskan kegiatan, dengan membuka akses serta kesempatan bagi warga lokal untuk penguatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program pemagangan.

Dirinya menilai hal ini bentuk komitmen Perusahaan terhadap program Pemkot Bontang terkait penguatan kapasitas masyarakat, sehingga kedepan kemandirian mampu terwujud seiring makin terserapnya SDM lokal di pasar kerja dan industri.

"Terlebih di masa sekarang, sumberdaya manusia terampil, memiliki kom-

petensi dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi menjadi faktor penting mendapatkan peluang kerja. Sehingga adanya program pemagangan maupun pelatihan yang digelar, bisa mendorong kualitas SDM Bontang lebih berdaya saing," ungkap Najirah.

Najirah menilai, keterlibatan perusahaan memberikan bekal kompetensi juga bentuk kesiapan daerah menciptakan sumberdaya terampil, agar tidak hanya menjadi penonton di tiap kesempatan yang terbuka. Sehingga adanya Job Fair 2023, diharap semakin menguatkan sinergi pemerintah dan dunia usaha, untuk saling dukung dalam menciptakan tenaga kerja yang sesuai bakat, minat serta keterampilan yang dibutuhkan.

"Kita harus bergegas merubah diri untuk menjadi tenaga kerja andal dan mandiri. Untuk itu Pemerintah bersama dengan dunia usaha memfasilitasi hal tersebut melalui Job Fair ini, agar kedepannya masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas di dunia kerja," pungkas Najirah. (ADV)





Sukses Terapkan Upaya Efisiensi Energi, Badak LNG Raih Penghargaan Subroto 2023 Subsektor Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

BONTANG – Badak LNG terus menunjukkan komitmennya untuk keberlanjutan dan efisiensi dalam industri energi dengan menerima penghargaan bergengsi Subroto 2023 Subsektor EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) Kategori Manajemen Energi di Bangunan Gedung dan Industri. Penghargaan ini diterima langsung oleh Corporate Secretary Badak LNG Henny Trisnadewi bertempat di Ballroom Renaissance Bali Nusa Dua Resort. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat Badak LNG dalam menjalankan manajemen energi yang baik, efisien, serta ramah lingkungan.

Dalam upayanya untuk mencapai pengelolaan energi yang optimal, Badak LNG telah menerapkan Badak LNG Energy Management System (BEST) yang telah tersertifikasi ISO 50001:2018. Penerapan BEST secara konsisten telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan yakni efisiensi energi sebesar 8.366.566 GJ, efisiensi air sebesar 2.477.740 m³, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 403.743 ton CO₂eq, dan program 3R (reduce, reuse, recycle) yang berhasil mengurangi limbah B3 sebesar 79 ton dan non B3 sebanyak 258 ton. Selain itu, Badak LNG juga berkomitmen

dalam pelestarian flora dan fauna serta habitatnya yang menjadi bukti manajemen energi yang baik dapat menghasilkan dampak positif yang nyata.

Adapun hasil penerapan BEST juga terlihat pada hasil benchmarking dalam sektor industri pengolahan LNG dengan Badak LNG menduduki peringkat top 25% dalam hal intensitas konsumsi energi di tingkat nasional, peringkat 2 dari 8 perusahaan se-Asia Pasifik, dan peringkat 3 dari 16 perusahaan di level internasional. Selain itu, Badak LNG tetap berfokus pada inovasi yang dapat mengurangi penggunaan energi serta menekan emisi karbon seperti inovasi LPBS (LPG Production Booster System) dan otomatisasi sistem pengendalian antisurge kompresor refrijerasi. LPBS berhasil mengurangi konsumsi energi sebesar 1.307.167 GJ dan emisi sebesar 1.988 ton CO₂eq. Inovasi otomatisasi sistem pengendalian antisurge kompresor refrijerasi berdampak pada performa kompresor yang semakin optimum sehingga dapat menekan penggunaan fuel gas sebesar 4.899 kNm³/tahun dan mengurangi emisi sebesar 11.132 ton CO₂eq/tahun.

Pemanfaatan energi baru terbarukan di Badak LNG juga telah menjadi bagian

dari strategi Perusahaan dengan pemasangan PLTS di beberapa bangunan kantor dan kompleks Perusahaan. Upaya ini telah berhasil menekan emisi sebesar 1.245 ton CO₂.

Atas capaian ini, Henny Trisnadewi Corporate Secretary Badak LNG mengungkapkan rasa bangga dan juga menyampaikan komitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi energi kedepannya.

"Kami sangat bangga dengan penghargaan ini karena mencerminkan komitmen dan dedikasi Badak LNG dalam menjalankan manajemen energi yang baik dan berkelanjutan. Kami akan terus berusaha untuk menjalankan praktik berkelanjutan dan juga berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan," ungkap Henny.

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bagi para pemangku kepentingan yang telah berhasil melaksanakan program efisiensi energi, konservasi energi, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sukses Terapkan Budaya K3 di Lingkungan Kerja, Badak LNG Raih Penghargaan Concerned Company dalam WISCA 2023

Lanjutan Sukses

Bontang – Badak LNG sebagai anak perusahaan Subholding Upstream Pertamina tidak henti-hentinya dianugerahi penghargaan atas usaha yang konsisten dan berkesinambungan dalam menerapkan budaya K3 di lingkungan kerja. Kali ini, Badak LNG meraih penghargaan dari WSO Indonesia International sebagai Concerned Company/Corporation Award dalam ajang WSO Indonesia Asian Symposium & Safety Culture Award (WISCA)2023 pada Rabu, 18 Oktober 2023 di Yudistira Grand Ballroom, Jakarta. Penghargaan ini diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, kepada Senior Manager SHE&Q Department Badak LNG, Pandu Wijaya Perwira. Penghargaan ini diberikan atas tingginya komitmen Badak LNG dalam mengimplementasikan budaya dan menerapkan aspek K3 di lingkungan kerja dengan baik secara konsisten dan berkesinambungan.

World Safety Organization (WSO) merupakan non governmental organization (NGO) internasional yang berdiri pada tahun 1975 dan bergabung dalam United Nation Economic & Social Council (ECOSOC) sejak 1987. Selain berkantor pusat di Amerika Serikat, WSO juga

memiliki kantor perwakilan di 21 negara di seluruh dunia.

World Concerned Safety Culture Company Award (WISCA) merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan budaya K3 dengan sangat baik serta menyeluruh dan konsisten sehingga dapat memberikan value bagi perusahaan dan dunia, yang diselenggarakan setiap tahunnya baik di dalam maupun di luar negeri oleh WSO Indonesia dan WSO Internasional.

Keberhasilan Badak LNG dalam mempertahankan tingkat keselamatan kerja yang tinggi selama lebih dari 16 tahun bukan hanya sebuah pencapaian angka, tetapi juga cerminan dari budaya Perusahaan yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasionalnya. Untuk itu, dalam kesempatan yang sama Badak LNG didaulat sebagai salah satu pembicara dalam Talk Show Safety Culture yang disampaikan oleh Senior Manager SHE&Q Department Badak LNG, Pandu Wijaya Perwira.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kuatnya budaya keselamatan di Badak LNG ialah komitmen manajemen yang nyata. Ditambah dengan dukungan pekerja dan mitra kerja dalam mener-

apkan sistem manajemen keselamatan Perusahaan. Budaya peduli keselamatan dan keamanan dalam bekerja telah menjadi bagian dalam melaksanakan pekerjaan, dimana masing-masing individu selain memperhatikan keselamatan dan keamanan diri sendiri juga mengingatkan rekan kerjanya.

Menurut Pandu, pencapaian ini merupakan buah hasil kerja keras seluruh pekerja dalam membangun budaya keselamatan. "Pencapaian ini merupakan bukti atas komitmen Perusahaan untuk menjaga setiap pekerja agar selamat di tempat kerja. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dan kami akan terus menjaga standar tertinggi ini dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja," ungkap Pandu.

Dalam proses penerapan budaya K3, Badak LNG pun menerapkan komunikasi terbuka dan transparan terkait isu-isu keselamatan. Hal ini mendorong pekerja untuk lebih berani melaporkan bahaya potensial dan insiden kecelakaan tanpa menimbulkan kekhawatiran (No Blame Policy). Tidak hanya itu, penerapan pemberian penghargaan (reward) dan pengakuan kepada pekerja juga terbukti efektif menciptakan motivasi untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi. (rls)





Ilustrasi posbindu. (ist)

Banyak Manfaat Kesehatan Datang ke Posbindu

BONTANG – Masyarakat Bontang khususnya warga di Loktuan dan Guntung, yang masuk dalam wilayah Puskesmas Bontang Utara II diminta untuk rutin memperhatikan perkembangan kesehatannya dengan datang ke Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).

Hal itu diungkapkan Kepala Tata Usaha (TU) Puskesmas Bontang Utara II, Yulisda saat diwawancara redaksi.

Yulisda menjelaskan, banyak manfaat bisa didapatkan dengan rutin datang ke posbindu. Salahsatu yang utama adalah dapat mengontrol perkembangan kesehatan diri sendiri.

Di Posbindu sendiri dapat menerima pasien dengan rata-rata usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas. Dikatakan Yulisda, dengan mendatangi posbindu, seseorang akan mendapatkan semacam Medical Check Up (MCU) dasar atau biasa disebut screening.

"Dengan screening ini bisa diketahui

gejala penyakit yang akan muncul di dalam tubuh. Sehingga orang itu dapat mencegahnya sejak awal," ujarnya.

Permasalahannya adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi posbindu. Sehingga pihaknya harus memutar otak agar masyarakat bisa datang.

"Dulu yang datang ke posbindu bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Sekarang kami lakukan jemput bola dengan mendatangi RT-RT. Sekarang sudah lumayan peningkatan jumlah pasiennya," bebernya.

Namun begitu, pihaknya tetap meminta kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan posbindu ini dengan maksimal, karena kesehatan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan.

Dengan terus mengontrol perkembangan kesehatan, maka seseorang dapat mencegah sejak dini penyakit yang akan bersarang di tubuh. (al/adv)



Ilustrasi penerapan wolbachia. (ist)

Program Inovasi Wolbachia Berjalan, Masyarakat Diminta Tetap Terapkan PHBS Cegah DBD

BONTANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang melalui Puskesmas Bontang Utara II meminta agar masyarakat tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan 3 M untuk mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD). Walaupun saat ini sudah ada program baru, yaitu inovasi wolbachia.

Hal itu diungkapkan Kepala Tata Usaha (TU) Puskesmas Bontang Utara II, Yulisda beberapa waktu lalu.

Dikatakan Yulisda, saat ini Bontang menjadi salahsatu pilot project program inovasi wolbachia, dari 5 kota yang terpilih se-Indonesia. Inovasi wolbachia merupakan program terbaru pemerintah Indonesia untuk menuntaskan DBD.

Peluncuran Nyamuk Wolbachia sudah berlangsung September lalu di Bontang. Saat ini sudah memasuki tahap service pertama. Karena setiap 2 minggu sekali nyamuk wolbachia akan menetas dan harus ada pergantian pallet.

"Walaupun inovasi wolbachia ini adalah program baru namun masyarakat harus tetap laksanakan PHBS. Karena kita belum bisa mengetahui apakah program baru ini berhasil atau tidak," ujarnya.

Lantaran program wolbachia ini masih membutuhkan waktu lama, maka masyarakat tetap diminta menerapkan PHBS dan 3M, sebagai langkah pencegahan DBD yang selama ini sudah digaungkan. (al/adv)



Foto: Ilustrasi Cath Lab. (ist)

Cath Lab Sudah Tersedia di RSUD Bontang, Mudahkan Dokter Diagnostik Penyakit Jantung

BONTANG – Saat ini di RSUD Taman Husada sudah tersedia cath lab. RSUD Bontang menyediakan cath lab sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada para pasiennya.

Cath Lab adalah suatu pelayanan yang dilakukan di laboratorium kateterisasi jantung dan angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah.

Cath Lab atau kateterisasi jantung dan angiografi ini adalah prosedur yang memanfaatkan sinar-X untuk menampilkan gambaran pembuluh darah di berbagai organ tubuh.

Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik di RSUD Taman Husada menjelaskan, pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk memeriksa sumbatan, penyempitan, atau pelebaran pem-

buluh darah dan jantung.

“Bisa dikatakan baru RSUD Bontang yang memiliki alat medis Cath Lab ini,” ungkapnya.

Alat yang digunakan dalam Cath Lab bisa menghasilkan gambaran pembuluh darah secara detail. Sehingga dapat membantu dokter secara akurat, dalam tindakan operasi atau Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA).

“Untuk alat medis kami akan berusaha untuk memenuhinya, akan tetapi, jika dilihat lagi dengan secara rinci masih saja ada beberapa yang kurang,” paparnya.

RSUD Bontang akan terus melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Maka dari itu, menentukan skala prioritas harus diputuskan bersama dan didahulukan mana alat medis yang benar-benar sangat penting dan lebih urgent. (dwi/adv).



HARAP PROGRAM YANG ADA MEMBAWA PERUBAHAN



**INGATKAN PERUSAHAAN DI BERAU
SERAP TENAGA KERJA LOKAL**



HARAP PROGRAM YANG ADA MEMBAWA PERUBAHAN

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengapresiasi pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan serta ekonomi kreatif.

Dia menilai, dengan adanya kegiatan tersebut ada keinginan untuk memajukan pariwisata Berau. Terlebih dengan adanya perjanjian dengan beberapa OPD terkait bahkan dengan jasa perbankan serta Forkopimda Berau.

Apalagi dengan APBD Berau yang besar tahun ini yang mencapai Rp 5,1 triliun. Disayangkan jika pemanfaatannya justru tidak tepat sasaran. Dirinya berharap program-program yang ada bisa membawa perubahan. Baik itu melalui ekonomi kerakyatan, UMKM hingga pariwisata.

Diakuinya keunggulan wisata di Berau sangat liar biasa keasliannya. Yang tidak dimiliki daerah lain bahkan semua ada di Berau.

Makanya dirinya berharap, kepada pemerintah pusat baik melalui Kemenkominfo maupun Kemenparekraf untuk memperhatikan Kabupaten Berau sebagai penyangga IKN ke depan, terutama pada sektor pariwisata.

"Tolong Berau dimonitor jangan di kota-kota besar saja," ungkapnya.

Sehebat apa pun konsep wisata yang dibuat akan percuma jika harga tiket pesawat mahal. Wisatawan tentunya akan lebih memilih ke daerah yang lebih murah. Bahkan jika dibanding harga di Berau, orang akan memilih pergi ke luar negeri seperti, Filipina, Thailand atau Singapura.



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Sedangkan, Kaltim sebagai penghasil pendapatan terbesar di Indonesia sudah seharusnya melihat orang-orang yang berkompetensi untuk menata Berau.

"Jangan hanya potensi Kaltim yang dihabiskan. Tapi untuk pengembangan pariwisata sebagai persiapan nanti setelah pertambangan habis malah tidak ada," jelasnya.

Seharusnya juga mulai saat ini pemerintah daerah sudah mempersiapkan ekowisata ini sebagai pengganti pendapatan asli daerah. Serta membantu Berau menjadi penyangga IKN ke depan. Yang membutuhkan konsep dan program yang benar-benar jelas.

"Seorang Gubernur Kaltim Isran Noor saat awal menjabat pernah memberikan kucuran anggaran untuk Berau mencapai Rp 300 miliar. Bahkan di akhir masa jabatan-

nya untuk peningkatan akses jalan ke pesisir sebanyak Rp 500 miliar," terangnya.

Diharapkan ke depan dengan adanya pembangunan akses jalan tersebut bisa membawa perubahan dan mendatangkan banyak wisatawan untuk berkunjung ke Berau. Tentunya itu menjadi tumpukan pariwisata, pihaknya sebagai wakil rakyat akan mendukung dan mengesahkan anggaran jika memang digunakan untuk kemajuan Bumi Batiwakkal.

"Salah satu yang bisa dilakukan yakni peningkatan SDM. Misalnya pelatihan guide atau menyiapkan peta wisata di bandara," paparnya.

"Bisa juga membuka lapangan pekerjaan, misal nanti di Derawan atau Maratua dibuka UPTD DLHK di sana. Atau bisa juga menyiapkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)," urainya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

PENINGKATAN JEMBATAN SEI SATTI HARUS RAMPUNG DESEMBER

TANJUNG REDEB - Peningkatan infrastruktur penunjang terus digencarkan. Salah satunya seperti Jembatan Sei Satta yang ada di Jalan Poros Tanjung Batu.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mendorong agar peningkatan jembatan tersebut dapat segera selesai. Meski ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

"Semoga akhir tahun ini selesai dikerjakan, karena pengerjaan jembatan sudah terprogram dalam beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, perbaikan Jembatan Sei Satta sudah terprogram pada lima tahun yang lalu. Hanya saja,

pada tahun ini benar-benar didorong untuk segera diselesaikan.

"Kurang lebih 5 tahun lalu ya. Karena memang, diutamakan jalan-jalan alternatif untuk memperpendek jalur kita, jika mau menuju ke pariwisata di Tanjung Batu," terangnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, tidak hanya penyelesai Jembatan Sei Satta, namun akses jalan yang lainnya pun terus digencarkan guna mempermudah perjalanan menuju tempat pariwisata yang ada di Bumi Batiwakkal.

"Alhamdulillah tahun ini bisa selesai. Nanti kita coba jalan ke kampung, akses-akses pariwisata ini bisa segera terselesaikan," pungkasnya. (adv/set)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman.

PERDA YANG SUDAH DISAHKAN HARUS ADA PERBUP

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman mendorong pemerintah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) dari seluruh Peraturan Daerah (Perda) yang ada.

Dia mengungkapkan, dengan tidak adanya aturan turunan berupa Perbup, banyak Perda yang tidak berjalan dengan maksimal.

"Apalagi di dalam Perda tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait masalah teknis yang harus diterapkan di lapangan," ungkapnya.

Rahman meminta Pemkab Berau dapat segera menyusun Perbup, tujuannya agar Perda yang ada dapat berjalan maksimal.

"Kita semua menginginkan semua perda yang ada bisa aplikasikan maksimal di lapangan," katanya.

Dia menerangkan, beberapa waktu lalu ada empat Raperda yang disahkan

menjadi Perda. Seperti Perda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan serta Perda Pengumpulan Uang dan/atau Barang.

"Juga Perda Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Semua perda itu diharapkan segera diterapkan di lapangan," bebernya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, penyusunan Perbup didukung oleh SDM yang memadai. Karena itu, tenaga ahli dan profesional perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perangkat pendukung itu.

"Pastinya memerlukan tenaga ahli dan berkualitas dalam mengelola perda yang ada secara profesional, tangguh, gesit, dan cekatan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari Perda dapat tercapai dan dirasakan," pungkasnya.

(adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

CEGAH BERSAMA PEREDARAN MIRAS DAN NARKOTIKA

TANJUNG REDEB – Masih adanya peredaran minuman keras (Miras) dan narkotika di Berau menjadi perhatian serius yang harus segera diselesaikan.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, belakangan ini ada ratusan kasus yang terjadi akibat Miras dan narkotika. Sehingga, menurutnya harus ada upaya pencegahan.

“Sebagai bentuk upaya pencegahan, pemerintah bisa mengadakan penyuluhan yang dimulai dari sekolah-sekolah mengenai bahaya miras dan narkoba,” ungkapnya.

Peri menilai, pencegahan dini harus dilakukan bersama-sama agar membuahakan hasil yang maksimal. “Terutama ini tanggungjawab pemerintah, melalui instansi terkait untuk memberikan penyuluhan dan lainnya,” terangnya.

Politikus Gerindra ini berharap, seluruh pihak bisa bersinergi mewujudkan Kabupaten Berau bebas narkoba dan peredaran miras untuk menekan angka kasus kriminal. “Muaranya kan kita menginginkan terciptanya Berau yang damai dan jauh dari permasalahan yang dapat merugikan kita,” pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.

INGATKAN PERUSAHAAN DI BERAU SERAP TENAGA KERJA LOKAL

TANJUNG REDEB - Banyaknya perusahaan yang bergerak di berbagai sektor di Kabupaten Berau diharapkan dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto membeberkan bahwa ada perusahaan di Bumi Batiwakkal yang justru malah menyerap pekerja luar daerah, bahkan tenaga kerja asing.

"Padahal saya yakin, SDM Berau memiliki potensi dan berhak mendapatkan pelatihan serta pengembangan diri. Ini agar para pekerja itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan perusahaan," katanya.

Diketahui, jumlah tenaga kerja asing yang diserap oleh perusa-

haan yang ada di Berau mencapai 46 orang. "Saya sangat mengharapkan kesadaran pihak perusahaan untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal," tegasnya.

"Ini juga sebagai wujud kontribusi dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Berau," tambahnya.

Untuk itu, Politikus NasDem ini menegaskan, akan terus mendorong tenaga kerja lokal lebih diprioritaskan guna pemberdayaan masyarakat di Bumi Batiwakkal.

"Di samping itu, tenaga kerja lokal juga menjadi tanggung jawab kita bersama serta memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan untuk kemajuan," tandasnya. (adv/set)



DITRESNARKOBA POLDA KALTIM MUSNAHKAN 81,967 GRAM SABU



**KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN
SELIDIKI DUGAAN KORUPSI
KPU BALIKPAPAN**



Proses pemusnahan oleh Direktorat Resnarkoba Polda Kaltim dari dua orang tersangka pada Selasa (31/10/2023).

DITRESNARKOBA POLDA KALTIM MUSNAHKAN 81,967 GRAM SABU

BALIKPAPAN - Polda Kaltim melalui Direktorat Resnarkoba menggelar pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan pada Senin (23/10/2023) lalu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP Nyoman Wijana mengatakan, yang berhasil diungkap seberat 93,367 gram. Namun yang dimusnahkan pada kesempatan kali ini di Ruang Rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 81,967 gram.

"Sisanya kita sisihkan sebagai barang bukti di pengadilan nanti," ujarnya Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut Nyoman Wijana menjelaskan, barang bukti sabu ini pengungkapan dari dua tersangka berinisial SS (37) dengan barang bukti sebanyak 20,287 gram sabu, dan tersangka SK (40) seban-

yak 73,08 gram.

"Barang bukti dari kedua tersangka ini juga sudah dilakukan uji lab oleh BPOM Samarinda seberat gram dan positif sabu," jelasnya.

Seluruh barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara bersama-sama diblender dan dilarutkan ke dalam air. Yang kemudian dibuang ke dalam saluran kamar mandi dan disaksikan langsung oleh para tersangka.

"Berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan uji BPOM Samarinda maka tersangka SS dan SK mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Kantor KPU Kota Balikpapan.

KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN SELIDIKI DUGAAN KORUPSI KPU BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Balikpapan saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan dalam proyek pengadaan catering.

Kasi Intel Kejari Kota Balikpapan, Ali Mustofa mengatakan, bahwa kasus ini bukan pengembalian dari hasil penanganan yang dilakukan oleh Polresta Balikpapan.

Pihak kejaksaan lebih kepada penyelidikan dugaan korupsi, sedangkan pihak kepolisian terkait dugaan kasus pidana penggelapan.

"Memang saat ini Polres sedang menangani tindak pidananya, tapi kami dari Kejaksaan juga fokus untuk menangani dugaan tindakan korupsi terkait anggaran proses mengeluarkan uangnya," ujarnya Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut Ali menjelaskan, dugaan korupsi tersebut terkait dengan pengelolaan anggaran yang ada di lingkungan KPU Kota Balikpapan. Termasuk menyangkut proses pengeluaran anggaran di Sekretariat KPU Kota Balikpapan.

"Untuk penyelidikan kasus ini sudah ada 7 orang saksi dari pihak KPU Kota Balikpapan yang dimintai keterangan," jelasnya.

Dijelaskan Ali Mustofa, kasus ini bermula masalah tunggakan pembayaran catering senilai Rp 157 juta. KPU Kota Balikpapan dilaporkan menunggak pembayaran catering sejak Desember 2022 hingga Februari 2023.

Dari keterangan pihak penyedia, yakni CV CBM yang mengaku memang belum mendapatkan pembayaran sama sekali dari KPU Kota Balikpapan. Tetapi dari pihak KPU Balikpapan menyatakan, bahwa sudah membayarkan kepada pihak ketiga atas nama Ahmad Zubaidi. Berdasarkan keterangan dari pimpinan CV CBM bahwa nama Ahmad Zubaidi tersebut tidak ada dalam struktur.

Saat ini, Ahmad Zubaidi telah ditetapkan tersangka oleh Polresta Balikpapan dan telah ditahan di Rutan Balikpapan atas dugaan kasus penggelapan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat Nonton Bareng Film Petualangan Sherina 2, di E-Walk XXI Balikpapan, Senin (30/10).

GELAR NOBAR PETUALANGAN SHERINA 2, HETIFAH APRESIASI KEMAJUAN EKOSISTEM PERFILMAN NASIONAL

BALIKPAPAN – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menginisiasi gelaran Nonton Bareng Film Petualangan Sherina 2, di E-Walk XXI Balikpapan, Senin (30/10/2023) malam. Kegiatan Nonton Bareng atau Nobar turut dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Nobar Film Petualangan Sherina 2 yang digagas oleh Hetifah bersama tim ini merupakan wujud dukungan terhadap perkembangan ekosistem perfilman di Tanah Air sekaligus apresiasi pada Kemendikbudristek yang berkomitmen memajukan industri perfilman.

Hetifah mengatakan, film bukan sekadar visualisasi seni budaya, namun juga menjadi alat memahami sesuatu hal yang terjadi untuk menjadi pembelajaran bagi diri sendiri. Melalui film banyak hal dapat dipahami untuk memotivasi diri.

“Dengan begitu ekosistem perfilman di Tanah Air harus didukung dan membutuhkan andil seluruh pihak masyarakat agar makin maju dan berdaya saing di kancah internasional. Terutama film yang mendidik dan mampu menumbuhkan jiwa berkarya generasi muda bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut Hetifah menjelaskan, para sineas anak bangsa juga tidak kalah hebatnya dalam memproduksi karya seni film yang dihadirkan kepada publik dengan penuh pesan moral sekaligus mendidik ke publik.

“Inspirasi dan kreativitas seperti itulah yang berkontribusi besar terhadap kemajuan ekosistem perfilman Indonesia. Hal ini harus mendapat perhatian penting dari pemerintah dan DPR RI agar mencari upaya memacu munculnya lagi sineas na-

sional, terutama dari generasi muda, yang melahirkan film berkualitas,” jelasnya.

Hetifah juga menyampaikan apresiasi besarnya kepada pihak Kemendikbudristek yang selama ini konsisten dan komitmen memajukan ekosistem perfilman nasional melalui segala upaya strategi sehingga sinema Indonesia pun kompetitif.

Hetifah menyebut, kepedulian dan kinerja serius Kemendikbudristek membangun ekosistem perfilman nasional merupakan bukti kehadiran negara pada pemajuan kebudayaan sesuai amanat undang-undang.

“Saya mengimbau agar apa yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk memajukan ekosistem perfilman nasional mendapatkan dukungan dari para pegiat film dan masyarakat. Tujuannya agar dunia perfilman bangsa Indonesia unggul di tataran global,” tambah Hetifah.

Melanjutkan kesuksesan film pertamanya di tahun 2000, film Petualangan Sherina 2 yang masih disutradarai Riri Riza dan diproduksi oleh Mira Lesmana ini sendiri mengisahkan perjalanan lanjutan dari petualangan Sherina (Sherina Munaf) dan Sadam (Derby Romero) di Pulau Kalimantan.

Konsep film yang diselengi dengan lagu-lagu seperti mengajak penontonnya secara tidak langsung untuk ikut menyanyi dan merasakan euphoria Petualangan Sherina 2. Film Petualangan Sherina 2 juga seperti menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan dengan nuansa musik yang kental. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Kepala Dinsos Kota Balikpapan, Edy Gunawan usai melaksanakan senam bersama ODGJ.

ODGJ DI BALIKPAPAN BERTAMBAH, DINSOS TERUS LAKUKAN PROGRAM PEMULIHAN

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berupaya dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang merupakan salah satu fokus kegiatan dan program memulihkan jiwa sebelum dikembalikan ke pihak keluarga.

Kepala Dinsos Kota Balikpapan, Edy Gunawan mengatakan, adapun program rutin yang dilakukan dalam memulihkan jiwa ODGJ, yakni dengan menggelar senam bersama.

"Ini merupakan inovasi kami sebelum mereka itu kembali ke lingkungannya," ujarnya, Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut Edy Gunawan menjelaskan, Dinsos bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap ODGJ.

"Kemudian juga dilakukan siraman rohani sebelum kami kembalikan ke rumahnya masing-masing," jelasnya.

Adapun ODGJ yang diajak untuk senam yang kondisinya sudah pulih. Dinsos menjemput ODGJ dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota Samarinda kemudian diinapkan di rumah Antaran Dinsos Kota Balikpapan.

"Mereka itu setelah pulang dari rumah sakit

kondisinya agak tenang, karena obatnya teratur," tambah Edy Gunawan.

Kendati demikian yang ia takutkan adalah setelah dikembalikan ke keluarga atau ke rumah masing-masing. Oleh sebab itu, ia pun juga mengumpulkan keluarga ODGJ untuk diberi pemaparan terkait penanganannya.

"Seperti obatnya tidak boleh lepas, dan memancing hal-hal yang membuat dia kembali kumat," tegasnya.

Disampaikannya, pada tahun 2023 jumlah penderita ODGJ mengalami peningkatan, yang mencapai 170 orang.

"Dulu tahun 2019 yang saya punya datanya itu masih di bawah 100. Sekarang sudah sampai 170 orang. Naik ini," ujarnya lagi.

Adapun faktornya mulai dari pertambahan penduduk, di mana dugaannya masyarakat memiliki ekspektasi yang tak tercapai hingga terjadi permasalahan sosial.

"Penanganan itu selain dari RSJ juga di Rumah Antaran, sementara itu untuk anggaran masuk dalam anggaran rehabilitasi," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Asisten I Kota Balikpapan, Zulkifli.

CEGAH PENYAKIT SOSIAL, SATGASUS POL PP AKAN DIAKTIFKAN KEMBALI

BALIKPAPAN - Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) disebutkan akan membawa dampak sosial baru di daerah. Pemindahan IKN akan diikuti peningkatan jumlah penduduk yang signifikan.

Persoalan sosial yang muncul juga akan meningkat. Mulai dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penyakit sosial lainnya. Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi dalam menekan dampak yang ditimbulkan.

Asisten I Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan sudah pernah mencoba mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

"Saya akan koordinasikan kembali dengan Satpol PP untuk mengaktifkan kembali Satgasus. Termasuk akan menentukan kembali langkah hukum yang akan diambil dalam upaya penanggulangan dampak sosial yang terjadi

saat ini," ujarnya, Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut mantan Kasatpol PP Kota Balikpapan ini menjelaskan, Satgasus PMKS beranggotakan orang terlatih alumni Komando Cadangan (Komcad). Dalam menjalankan tugas, Satgasus PMKS dilengkapi atribut dan identitas seperti diberikan pakaian khusus. Juga kendaraan khusus untuk patroli secara rutin ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul anjal, pengamen dan lainnya.

Lebih lanjut Zulkifli memastikan, bahwa peran Satgasus cukup efektif. Bahkan pernah berhasil mengungkap adanya kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh seorang ibu di Kota Balikpapan.

"Satgas ini sudah pernah dibentuk dan sangat efektif, tapi dari informasi yang kami terima ini ada perubahan. Makanya saya akan mendorong kembali Satpol-PP PP untuk mengaktifkan kembali dan kalau perlu ini ditambah dan dikuatkan," jelasnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



PILKADA 2024, PEMKAB PASER HIBAHKAN RP 48 MILIAR UNTUK PENYELENGGARA

**KASUS SIDANG OKNUM DPRD
PASER HADIRKAN SAKSI AHLI**





Foto: Proses penandatanganan NPHD

PILKADA 2024, PEMKAB PASER HIBAHKAN RP 48 MILIAR UNTUK PENYELENGGARA

PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten Paser akan menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan total sekitar Rp 48,8 miliar.

Penerimaan itu berdasarkan telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Paser, Fahmi Fadli bersama Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid dan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser, Nur Khamid, Senin (30/10/2023).

Kepala Bidang (Kabid) Polidik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri Ormas) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Paser, Acmad Hartono menjelaskan, penyaluran dilakukan dalam dua tahap.

"Untuk di 2023 ini kita hibahkan masing-masing 40 persen berdasarkan usulan dan dikurangi dari pembagian pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim," katanya.

Dijelaskannya, total alokasi anggaran Rp 48,8 miliar itu dibagi untuk KPU Kabupaten Paser se-

banyak Rp 29,2 miliar dan untuk Bawaslu Kabupaten Paser sebanyak Rp 13,6 miliar

Nilai hibah itu diterima dalam dua tahap, yakni di 2023 dan 2024. Untuk 2023 ini, diterima KPU Kabupaten Paser senilai Rp 12 miliar dan Bawaslu Kabupaten Paser senilai Rp 6,2 miliar. Sementara sisanya akan disalurkan pada 2024 mendatang.

"Jadi di 2024 kita akan salurkan sisanya 60 persen," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Paser, Fahmi Fadli memastikan, Pemkab Paser mendukung penuh segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam penyelenggara Pemilu untuk kesuksesan Pilkada Serentak 2024. Dukungan tersebut dipastikannya dalam bentuk anggaran.

"Dukungan kami ke penyelenggara dalam bentuk anggaran," singkat Fahmi.

Begitu juga dukungan untuk keselamatan kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh petugas AdHoc Pemilu 2024 yang ada di Kabupaten Paser. "Sebab mereka termasuk pekerja rentan. Kita juga akan memenuhi target Universal Health Coverage (UHC)," katanya.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kabupaten Paser, Ahmad Rafii

KASUS SIDANG OKNUM DPRD PASER HADIRKAN SAKSI AHLI

PASER - Nasib oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Ahmad Rafii yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan akibat dugaan pemalsuan surat kini berproses di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan informasi yang didapat, kasus yang didakwakan kepada Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, kini sudah ke tahap menghadirkan saksi ahli yang sudah digelar pada Selasa (24/10/2023) lalu.

Penasehat Hukum Ahmad Rafii, Hendrik Kusnianto menyatakan, pihaknya menghadirkan Joni Endardi sebagai saksi ahli yang merupakan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Peneliti di Balai Bahasa DIY (BBY).

"Dari keterangannya, seorang ahli bahasa tidak boleh dan tidak ada kewenangan menyatakan palsu atau tidaknya suatu surat," kata Hendrik dalam tulisannya.

Hal itu berdasarkan keahliannya melalui pengalaman yang dimiliki dalam meneliti bahasa atau linguistik di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, berdasarkan keterangan Ahli,

sambung Hendrik, dari seluruh perspektif keilmuan, jenis kertas surat pun dianggap sah.

Dari penjelasan itu, Hendrik menegaskan, bahwa kliennya tidak terbukti melakukan hal yang didakwakan tersebut. Kendati begitu, persidangan bakal dilanjutkan pada Rabu (1/11/2023) mendatang dengan menghadirkan saksi ahli pidana.

"Besok kami menghadirkan Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH. yang merupakan seorang ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang cukup terkenal di Indonesia," katanya.

Diketahui, dalam kasus ini, Rafii terjerat perkara penggunaan surat palsu atas lahan atau tanah di kawasan Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan luasan 4,2 hektare.

Lahan tersebut sejatinya dimiliki oleh PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) yang beroperasi di sektor pengolahan minyak kelapa sawit. Potensi kerugian PT KRN sebagai pelapor diperkirakan mencapai Rp 11 miliar. Rafii dijerat pasal 263 ayat 1 atau 2 KUHP entang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Ahmad Rafii merupakan Anggota DPRD Kabupaten Paser yang kini masih aktif dari Fraksi NasDem dari daerah pemilihan (dapil) 3 yaitu Kecamatan Long Ikis dan Long Kali serta duduk di Komisi 3 yang membidangi pembangunan.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari